

## **BAB 2**

### **SEJARAH DAN KONTEKS**

#### **2.1 Skotlandia**

Merupakan sebuah negara bagian di Britania dengan ibukota Edinburgh yang berbatasan dengan Inggris dibagian selatan, Laut Utara dibagian timur, barat daya dengan North Channel dan Laut Irlandia, sedangkan sisanya berbatasan dengan Samudera Atlantik. Skotlandia memiliki luas wilayah 78,722 km<sup>2</sup> daratan dan 1,577 km<sup>2</sup> berupa perairan (Executive, 2003). Skotlandia memiliki populasi kedua terbanyak negara bagian Britania dengan jumlah 5,404,700 jiwa dimana mayoritas masyarakat bermukim di Edinburgh, Glasgow, Aberdeen dan Dundee (Tabel 2.1). Masyarakat dengan umur antara 25 sampai 64 tahun mendominasi populasi Skotlandia, diikuti oleh yang berumur dibawah 15 tahun dan seimbang untuk yang berumur diatas 64 tahun dan 15-24 tahun (The Office for National Statistics, 2017). Skotlandia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan bahasa Skotlandia. Walaupun Skotlandia menggunakan bahasa Inggris sebagai yang utama namun masyarakat Skotlandia memiliki logat Inggris sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh National Records for Scotland, Skotlandia merupakan salah satu negara bagian yang mengalami Aging Population.

**Tabel 2. 1 Daftar Populasi berdasarkan wilayah di Skotlandia**

Area	Populasi (ribu)
<b>Glasgow</b>	600
<b>Edinburgh</b>	493
<b>North Lanarkshire</b>	338
<b>Aberdeen &amp; Aberdeenshire</b>	229
<b>Aberdeenshire</b>	261
<b>Dundee</b>	148

Sumber: Components of population change by administrative area, mid-2007 to mid-2017 (*National Records of Scotland 2017*).

Area-area tersebut juga dibagi berdasarkan tingkat perekonomiannya, terdapat area yang disebut dengan area terdepan dan ada juga yang disebut sebagai area terbelakang (Tabel 2.2). Pemerintah Skotlandia menggunakan index pengukuran standar penilaian seperti penghasilan, kesehatan dan pendidikan dalam menentukan area terbelakang dan area terdepan di Skotlandia. Penghasilan perkepala keluarga di Skotlandia rata-rata berada di sembilan puluh tiga (93) poin dimana lebih rendah dibandingkan London sebesar seratus tiga puluh satu (131) poin namun lebih tinggi dibandingkan Wales dan Irlandia Utara (Harari, 2016). Tingkat perekonomian tersebut juga diimbangi dengan tingkat pengangguran Skotlandia yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2011 hingga 2014 dari delapan koma satu persen menjadi empat koma lima persen (Research, 2018).

**Tabel 2. 2 Daftar area terdepan dan terbelakang di Skotlandia hingga 2016**

Area maju di Skotlandia	Area terbelakang di Skotlandia
Edinburgh	Glasgow
Aberdeen	North Lanarkshire
Aberdeenshire	Dundee
East Renfrewshire	
East Durbantonsire	

Sumber: *Using Scottish Index of Multiple Deprivation – Scottish Government 2017*

Sistem pemerintahan Skotlandia adalah sistem Penyerahan Parlemen dibawah Monarki Konstitusional Britania. Ini artinya Skotlandia mendapatkan transfer kekuatan dari pemerintah Britania untuk beberapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan lokal dan pembangunan ekonomi makro yang biasa disebut sebagai *Devolved Matters*. Sedangkan untuk urusan diluar tersebut biasa disebut *Reserved Matters* sudah pasti berada dibawah kontrol pemerintah Britania terutama urusan kedaulatan Britania (Parliament, 2016). Walaupun

demikian, mereka tetap berada dibawah Monarki Konstitusional Britania dimana yang di pimpin oleh Ratu Elizabeth II.

## **2.2 Sejarah penyatuan Skotlandia dan Inggris**

Bermula ketika James VI dari Skotlandia menjadi penerus Elizabeth I dari Inggris yang kemudian berganti nama menjadi James I. James I kemudian dikenal sebagai asal mula penyatuan Skotlandia dan Inggris. Penyatuan Skotlandia dan Inggris terjadi pada tahun 1603, namun banyak hal dan tempat di Skotlandia seperti gereja, sistem hukum, bahasa Skotlandia hingga sistem pendidikan yang masih sangat aktif di Skotlandia (Siregar, 2012). Penyatuan resmi parlemen Skotlandia dan Inggris dibentuk melalui *Act of Union* pada 1707, kedua negara akhirnya menyatukan kedua parlemen walaupun sebenarnya lebih merupakan parlemen Inggris karena perwakilan yang lebih banyak, parlemen tersebut berbasis di Kota Westminster, London sehingga biasa disebut sebagai *The Home of English Parliament* (Act of Union 1707, pasal 3). Selama berjalannya parlemen Britania, para pemimpin Britania jarang sekali berkunjung ke Skotlandia, sehingga publik Skotlandia tidak terlalu mengenal siapa pemimpin Britania (Siregar, 2012).

Penyatuan kedua negara tersebut diartikan sebagai penyerahan seluruh kendali permasalahan Skotlandia, walaupun dengan kebudayaan hingga tata krama yang mereka anggap tidak sama dengan masyarakat Inggris (Kendle, 1997). Pada abad ke-18 hubungan antara keduanya mulai membaik ketika para pemimpin Skotlandia mulai menyadari bahwa hukum Skotlandia tidak dapat diterapkan karena tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat mereka. Hal ini dapat dilihat melalui pembuatan *Lex Mercatoria* yaitu hukum yang seragam dalam hal komersial sebuah negara (Reid & Miller, 2005). Walaupun hubungan keduanya mulai membaik namun masih banyak masyarakat yang tidak terima apabila Skotlandia bersatu dengan Inggris. Mereka melihat para elit dan penguasa Skotlandia memberikan negara tersebut kepada Inggris (Kendle, 1997). Ketidaksenangan tersebut memunculkan banyak aksi protes terhadap Parlemen Britania sehingga memunculkan keinginan kekuasaan yang besar dan kemerdekaan (Bogdanor, 1979).

Skotlandia merupakan negara bagian Britania kedua dengan penduduk terbanyak dan wilayah kedua terbesar setelah Inggris dengan tingkat legislatif yang cukup kuat. Ini tertuang melalui Act of Scotland 1998. Parlemen Skotlandia dapat meloloskan hukum yang berbeda dari

negara bagian lain tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat Britania. Mereka membangun hubungan sendiri dengan Uni Eropa (UE), salah satunya dengan membentuk European and External Affairs Committee untuk memonitor implementasi hukum diarah Uni Eropa, membentuk UKREP (*United Kingdom Representation to the EU*) untuk mempromosikan kepentingan Skotlandia di UE, serta memiliki dokumen terkait peran dan kepentingan Skotlandia di UE yang berjudul *European Union: Forward Look for 2006* (Alistair, 2007).

### **2.3 Partai Nasional Skotlandia (1934-sekarang)**

Sebagai salah satu negara dengan sistem politik yang sangat aktif, Britania mempunyai banyak partai politik seperti Partai Buruh, Partai Konservatif, UKIP dan Partai Liberal Demokrat. Skotlandia sebagai negara bagian Britania pun juga memiliki partai politik regional yang nantinya akan mewakili suara Skotlandia di parlemen Britania, partai-partai tersebut antara lain: Partai Buruh Skotlandia yang berafiliasi dengan Partai Buruh Britania, Partai Liberal Demokrat, *Green Party*, Partai Konservatif yang berafiliasi dengan Partai Konservatif Britania dan Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang merupakan Partai Independen.

SNP dibentuk pada tahun 1934 merupakan sebuah partai minoritas yang ada di Skotlandia. SNP adalah gabungan dari Partai Skotlandia (1930-1932) dan Partai Nasional Skotlandia (NPS, 1928-1932). NPS saat itu memiliki visi untuk mendapatkan transfer kekuatan dari pemerintah Britania, sedangkan Partai Skotlandia berpegang dengan visinya untuk membuat Skotlandia merdeka. Saat itu, John MacCormick yang merupakan sekretaris NPS yang mempunyai keinginan kuat untuk menyatukan gerakan Nasional di Skotlandia oleh karena itu ia berkomunikasi dengan Partai Skotlandia dan mulai melakukan kerja sama sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi SNP ditahun 1934. Awal mula berdirinya SNP bukanlah bertujuan langsung untuk kemerdekaan namun untuk mendapatkan kekuatan Majelis Skotlandia, namun keinginan tersebut semakin mengarah pada keinginan besar untuk membuat Skotlandia menjadi negara merdeka.

Pada tahun 1935, SNP memulai percobaan pertama sebagai partai baru dengan delapan kursi, namun tidak satupun dari kursi tersebut berhasil dimenangkan oleh SNP. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 1945 SNP mendapatkan jatah kursi di Parlemen Britania namun dengan cepat kehilangan kursi tersebut karena ketidakpandaian mereka dalam mengamankan kedudukan. Terobosan SNP dimulai pada 1967 ketika SNP memenangkan dua kursi di parlemen.

Terobosan tersebut membawa kemenangan sendiri bagi partai minoritas tersebut karena pada tahun 1974 mereka berhasil mendapatkan kursi lebih banyak dengan total 11 anggota parlemen (Glen, 2015). Kesuksesan SNP tersebut membuat isu kemerdekaan mulai muncul dan menjadi salah satu agenda politik yang penting.

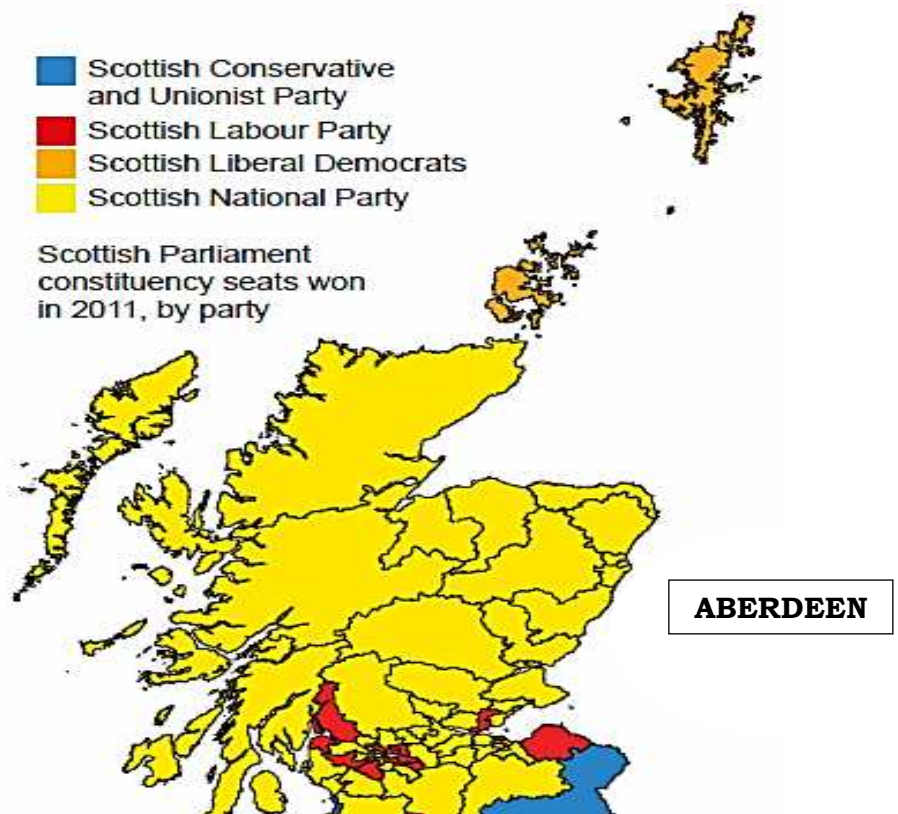
**Tabel 2. 3 Sejarah Partai Nasionalis Skotlandia (SNP)**

TAHUN	KETERANGAN
1967	SNP memenangkan 11 kursi anggota parlemen Skotlandia.
1970	Penemuan <i>North Sea Oil</i> yang terletak di Barat Laut Skotlandia yang bernilai tinggi untuk prospek ekonomi Skotlandia. SNP mengatakan bahwa <i>North Sea Oil</i> merupakan milik Skotlandia dan keuntungan yang didapat pun harus digunakan untuk kepentingan Skotlandia, dengan begitu Skotlandia dapat menjadi negara merdeka dari Britania (Roger, 1986).
1974	SNP menunjukkan ketidaksenangan mereka akan <i>European Community (EC)</i> dengan dua alasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EC yang terlalu <i>centralistic, bureaucratic</i> dan <i>elitist</i>.</li> <li>2. Saat itu keanggotaan Britania di EC masih belum jelas sehingga pemerintah Britania menolak perwakilan Skotlandia dalam negosiasi (Lynch, <i>Minority Nationalism and European Integration</i>, 1996a).</li> </ol>
1979	Referendum devolusi dilaksanakan pada 1 Maret 1979. Isu kemerdekaan pun dianggap sudah selesai. Namun, kebijakan pemerintahan Margaret Thatcher dari Partai Konservatif ternyata membawa protes yang besar dari masyarakat Skotlandia. Thatcher memutuskan untuk melakukan sentralisasi pemerintah yaitu menghapuskan pemerintah lokal agar tidak adanya para pembangkang (Macmillan, 1996). Masyarakat tidak setuju dengan kebijakan Thatcher yang baru untuk menghilangkan

	kekuatan pemerintah regional Skotlandia, Irlandia Utara dan Wales termasuk reformasi ekonomi yang mengurangi bantuan sosial dan industri Skotlandia (Glen, 2015). SNP melihat kritikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat Britania sebagai jembatan untuk memperkuat keinginan mereka melakukan referendum kemerdekaan.
<b>1983</b>	SNP mulai merubah haluannya menjadi Pro-European. Gordon Wilson selaku pemimpin SNP saat itu mengatakan bahwa mereka harus mengambil pendekatan yang lebih positif terlebih jika ingin memisahkan diri dari Britania. EC dianggap dapat membantu mereka terhindar dari masalah ekonomi. Selain itu, SNP juga tetap menggarisbawahi argumen mereka mengenai <i>Scottishness</i> bahwa masyarakat Skotlandia harus tetap menjunjung tinggi adat dan budaya mereka.
<b>1989</b>	Mengeluarkan visi mengenai EC yaitu <i>“one of a confederal family of nations working together to improve the quality of life of its constituent people.”</i>
<b>1992</b>	SNP memperkuat peran negara kecil dalam integrasi Uni Eropa (UE) serta memperjelas bahwa UE merupakan jantung SNP untuk mencapai kemerdekaan (Jolly, 2007). SNP menggunakan figur selebritas dan tokong penting yang mempunyai rasa kepemilikan sangat kuat akan kebudayaan Skotlandia.
<b>1997</b>	Skotlandia mendapatkan kekuatan devolusi dari pemerintah Britania untuk beberapa area ( <i>Reserved Matter</i> ). SNP menekankan Skotlandia merupakan negara multikultural yang sangat mengerti kebutuhan komunitas masyarakat Skotlandia.
<b>1998</b>	Pembentukan kembali parlemen Skotlandia melalui dokument Act of Scotland 1998. Dengan begitu, Skotlandia berhak

	mengatur beberapa area seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan lokal dan pembangunan ekonomi. Pembentukan kembali parlemen ini menjadi batu loncatan untuk mengadakan referendum kemerdekaan (Glen, 2015).
<b>1999</b>	SNP memenangkan 35 kursi di parlemen Skotlandia dan menjadi salah satu partai dengan kursi terbanyak.
<b>2007</b>	SNP beroperasi sebagai partai terbesar di Skotlandia.
<b>2011</b>	Berhasil menduduki kursi terbanyak di parlemen Skotlandia. Social Attitudes Survery menunjukkan bahwa tujuh puluh satu persen masyarakat percaya bahwa SNP dapat membawa Skotlandia lebih baik dengan kepentingannya (Pemerintah Skotlandia 2012).

Pada 2014, SNP menduduki kursi di Parlemen Skotlandia dengan jumlah 65 dari 128 kursi membuat SNP kembali menjadi Partai dengan kursi terbanyak di Parlemen Skotlandia (Government T. S., Scottish Government Statistics 2014-2015, 2016). Sebagai partai yang kuat, SNP membuktikannya melalui dominasi mereka diwilayah-wilayah Skotlandia yang ditunjukkan dalam bagan berikut:





SNP menguasai mayoritas wilayah-wilayah di Skotlandia seperti Edinburgh, Aberdeen dan tak terkecuali Dundee yang merupakan wilayah terbelakang di Skotlandia. Namun tidak demikian di Glasgow yang dikuasai oleh Partai Konservatif.

SNP merupakan salah satu *Yes Side* dalam rencana referendum kemerdekaan Skotlandia. Kampanye pihak *Yes* telah mempelajari Quebec Playbook mengenai langkah-langkah Quebec dalam mendapatkan kemerdekaannya dari Kanada. Sama seperti referendum Quebec 1995 yang mempersoalkan mengenai hubungan mereka dengan NAFTA (*North Atlantic Free Trade Agreement*), referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014 juga mempersoalkan mengenai pentingnya hubungan Skotlandia dengan UE. Pada dasarnya kampanye *Yes* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, mereka mengatakan bahwa Skotlandia akan tetap menjadi bagian dari jantung Eropa walaupun tidak pernah menjelaskan alasan mengapa berbagi kedaulatan dengan Britania adalah hal yang buruk. Beberapa para kritikus *Yes Side* berargumen bahwa British Union sudah hancur secara ekonomi (Torrance, 2014) (Hume, 1983).

#### **2.4 Partai Nasional Skotlandia (SNP) dan upaya pemisahan diri**

Sejak bergabung dengan Inggris, Skotlandia setidaknya sudah mengadakan upaya pemisahan diri selama lima kali sampai pada tahun 2014 yaitu: Devolusi Administrasi Skotlandia (1885), Scottish Home Rule Bill (1913), Referendum Devolusi I (1979), Referendum Devolusi (1997) dan Referendum Kemerdekaan I (2014). Mark Rouseau dan Raphael Zarinski mendefinisikan devolusi sebagai langkah yang tepat untuk mendapatkan kekuatan untuk mengatur dan meningkatkan ekonomi, sosial dan institusi politik untuk meminimalisir kurangnya efektivitas dan efisiensi apabila seluruh keputusan berada ditangan pemerintah pusat (Zarinski & Rouseau, 1985). Devolusi berbeda dengan desentralisasi dan federalisme. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lokal dapat dihapuskan oleh pemerintah



pusat namun dalam federalisme, kekuatan yang sudah diberikan tidak dapat dihapuskan begitu saja tanpa mahkamah konstitusional (Lupai, 2014).

Sebagai negara yang berperan dalam kegiatan internasional, Britania memiliki kewajiban untuk melaksanakan masalah dalam negerinya secara hati-hati dengan memperhatikan hukum ataupun kegiatan internasional. Skotlandia sebagai negara yang bergabung dan berada dibawah nama Britania ketika berhubungan dengan pihak luar juga diharuskan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, langkah Skotlandia dalam melakukan referendum pun juga sudah diperhitungkan.

Pada tahun 1979, SNP kembali melakukan referendum yaitu referendum devolusi pertama dengan memulai manifesto mereka dengan membangkitkan rasa kepemilikan masyarakat Skotlandia yang dikenal sebagai *A Firm of Scottishness and Belonging* atau lebih tepatnya *Anti-English* yang ditujukan terutama bagi mereka yang tidak mendukung SNP sebelumnya. Selain itu, SNP juga membawa isu Eropa serta menolak keanggotaan Britania di EC (Leith, 2008). Selain membangkitkan rasa kepemilikan masyarakat, kampanye juga berfokus pada isu ekonomi dimana masyarakat Skotlandia dengan penghasilan rata-rata merasa tidak mendapatkan keuntungan dari penyatuan Skotlandia dan Inggris, hanya mereka para penguasa dan elit saja yang diuntungkan. Pengangguran yang terus meningkat akibat melemahnya sektor industri manufaktur dan minyak sejak tahun 1975 membuat James Callaghan dari Partai Buruh membuat persetujuan dengan SNP dan Partai Sosial Demokrat Wales Plaid Cymru untuk memberikan kekuasaan dari pemerintah Britania kepada pemerinah Skotlandia dan Wales (Zarinski & Rousseau, 1985) (Department of Employment of Scottish Abstracts of Statistics, Scottish Government Yearbook 1987). Callaghan ingin tetap mengamankan posisi Partai Buruh di Skotlandia dengan menarik kepercayaan masyarakat. Referendum yang dilaksanakan pada 1 Maret 1979 ini berisikan keinginan untuk mendapatkan kekuatan untuk bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, sosial, masalah domestik dan permasalahan legal namun tidak berhasil diloloskan karena kurangnya dukungan.

Namun kegagalan tersebut tidak membungkam keinginan SNP karena pada tahun 1987 partai ini mengeluarkan manifesto yang salah satunya berisikan keinginan mereka bergabung dengan EC sebagai negara independen. Kebijakan mereka *Independence in Europe* membantu SNP untuk mencapai tujuan mereka membuat Skotlandia memisahkan diri dari Britania. SNP semakin menunjukkan bahwa dirinya merupakan pendukung integrasi Eropa (*Pro-European*).

Dengan *Pro-European* yang semakin melekat pada SNP mereka kembali mengeluarkan manifesto dengan pesan yang sama dan menekankan bahwa Skotlandia merupakan *Backwater of England* yang maksudnya adalah Skotlandia hanya dijadikan alibi oleh Britania untuk mendapatkan keuntungan dari North Sea Oil yang secara geografis lebih dekat dengan Skotlandia (Leith, 2008). Padahal, apabila menjadi negara merdeka maka mereka dapat mendapatkan keuntungan besar dari North Sea Oil. Kelanjutan dari kegagalan Referendum Devolusi 1979 terjawab pada Referendum Devolusi kedua kalinya yang dilaksanakan pada 11 September 1997 dengan alih-alih untuk memperkuat kelestarian Britania. Hasilnya ternyata berhasil dengan dukungan 74.29% setuju dengan inti dari referendum adalah pembentukan kembali Parlemen Skotlandia yang tertuang melalui Act of Scotland 1998 yang salah satunya berisi pembentukan kembali Parlemen Skotlandia termasuk beberapa pemberian kekuasaan dari Pemerintah Britania kepada Pemerintah Skotlandia untuk beberapa area (Dewdney, 1997).

Keberhasilan referendum devolusi pada tahun 1997 berlanjut pada tahun 2014, kali ini dengan konteks yang lebih luas yaitu kemerdekaan Skotlandia. Sejak 2007 ketika SNP menjadi partai minoritas Skotlandia, partai tersebut menyebut diri mereka sebagai *Scottish Government* atau lebih tepatnya partai yang benar-benar memikirkan masa depan masyarakatnya, mereka mulai merancang tahap-tahap kemerdekaan Skotlandia dan mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat Britania. Ketika SNP memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Skotlandia pada tahun 2011, agenda utama dari partai tersebut masih mengenai kemerdekaan Skotlandia. Dengan kemenangan mereka maka keinginan tersebut semakin didorong untuk terrealisasi. Melalui manifesto yang dikeluarkan pada tahun 2011, SNP menitikberatkan kebijakan mereka sebagai *Wealthier, Fairer, Safer, and Stronger* dimana mereka percaya bahwa masyarakat Skotlandia mempunyai hak untuk menentukan masa depan Skotlandia, negara mereka sendiri. Dalam manifesto tersebut dikatakan bahwa setiap negara di dunia menginginkan kemerdekaan. SNP menjanjikan bahwa apabila masyarakat memilih untuk merdeka maka Skotlandia dapat menjadi negara yang lebih baik, tingkat ekonomi, pengangguran serta kesehatan akan terjamin.

Ditahun 2014, SNP kembali mengeluarkan manifesto berjudul *Scotland's Future* yang memang dikhususkan untuk referendum kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada September 2014. SNP memberikan argumen apabila masyarakat memilih tidak maka Skotlandia tidak akan bergerak lebih maju namun jika memilih ya maka Skotlandia akan bergerak maju dengan rasa

percaya diri yang besar. Sebagian besar poin yang dicantumkan dalam manifesto tersebut adalah seputar ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, seperti:

1. Keuangan Skotlandia dianggap lebih besar dibandingkan negara bagian lain di Britania oleh karena itu SNP yakin bahwa Skotlandia memiliki platform yang kuat untuk membangun ekonomi mereka sendiri.
2. GDP perkepala di Skotlandia tinggi. Perekonomian Skotlandia dianggap memiliki sektor-sektor yang kuat seperti industri makanan dan minuman, energi hingga pariwisata.
3. Keluar dari keanggotaan Nuklir Persatuan Bangsa-bangsa dan mengalokasikan dana kesektor lain yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Skotlandia.
4. Terus menyediakan layanan kesehatan dengan kualitas yang tinggi, apabila Skotlandia merdeka maka pendanaan tidak perlu dikontrol oleh pemerintah Britania menggunakan *Barnett-Formula*.
5. Skotlandia akan tetap menjadi negara yang bekerja sama dengan dunia internasional terutama dengan UE namun tidak menutup hubungan Skotlandia dengan Britania dengan membentuk kedutaan untuk mewakili kepentingan Skotlandia.
6. Kepentingan masyarakat rural tidak terlalu didengar dalam forum UE karena Skotlandia tidak memiliki suara untuk mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, dengan menjadi negara merdeka maka Skotlandia akan berhubungan dengan UE secara langsung.
7. Memiliki kontrol untuk kesejahteraan dan lahan pekerjaan.
8. Memiliki konstitusi tertulis sendiri.
9. Mengedepankan budaya asli Skotlandia seperti sejarah dan peninggalan nenek moyang yang mudah tergoyah oleh budaya Inggris.
10. Meningkatkan kualitas pendidikan di area-area dengan tingkat membaca yang kurang.

Kesepuluh poin yang dicantumkan dalam manifesto SNP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan memiliki konstitusi tertulis dan menjadi negara merdeka berarti Skotlandia memiliki kontrol untuk semua permasalahan. Kampanye manifesto tersebut dilakukan dengan beberapa cara, mayoritas dengan turun langsung ke lapangan. SNP mengeluarkan dana sebesar £1 juta untuk mendistribusikan leaflet ke seluruh wilayah di Skotlandia melalui aktivis-aktivis mereka yang tersebar. Cara lainnya adalah dengan penggunaan sosial media oleh para pendukung SNP. Total dukungan

untuk kemerdekaan melalui sosial media sebanyak 76.000 – 106.000 (Facebook) dan 21.000 (Twitter), jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dukungan bagi pihak *Better Together* yaitu pihak yang menolak referendum kemerdekaan Skotlandia. Selain itu, SNP juga menarik dukungan didaerah-daerah terbelakang dengan membuat Festival atau Flash Mobs yang bersifat menarik (McHarg, Mullen, Page, & Walker, 2016).